



LUMAJANG
EKSOTIK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Veteran No. 72 Lumajang
Telp. (0334) 889822, Fax. (0334) 894444
LUMAJANG - 67316

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam menjalankan segala aktifitasnya agar dapat dinilai kinerjanya dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang harus di capai, Tujuan dan Sasaran guna mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

LKj ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun berikutnya yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari sempurna, mengingat latar belakang personil dan pendidikan yang beragam, pengalaman kerja yang masih minim serta kemampuan dalam memahami pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang masih belum optimal. Oleh sebab itu saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang.

Lumajang, 17 FEB 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURCONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.....	2
D. Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>).....	5
E. Dasar Hukum.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Rencana Kerja Tahunanan	14
C. Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legimitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Disamping itu LKj merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun

kegagalan pelaksanaan tupoksi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan melembaga. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan kontribusi baik pada pemerintah daerah maupun pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan maupun kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara jelas kepada publik tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dan merupakan data tertulis agar kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dan dapat dipakai sebagai bahan dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

C. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

1. Dasar Hukum penetapan SKPD

Cikal bakal berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai peningkatan status Kantor menjadi Dinas yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Struktur Organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang Kemudian di kuatkan oleh Perda Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2005 dan disempurnakan dengan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilimpahkan.

2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sesuai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan

pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilimpahkan.

Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

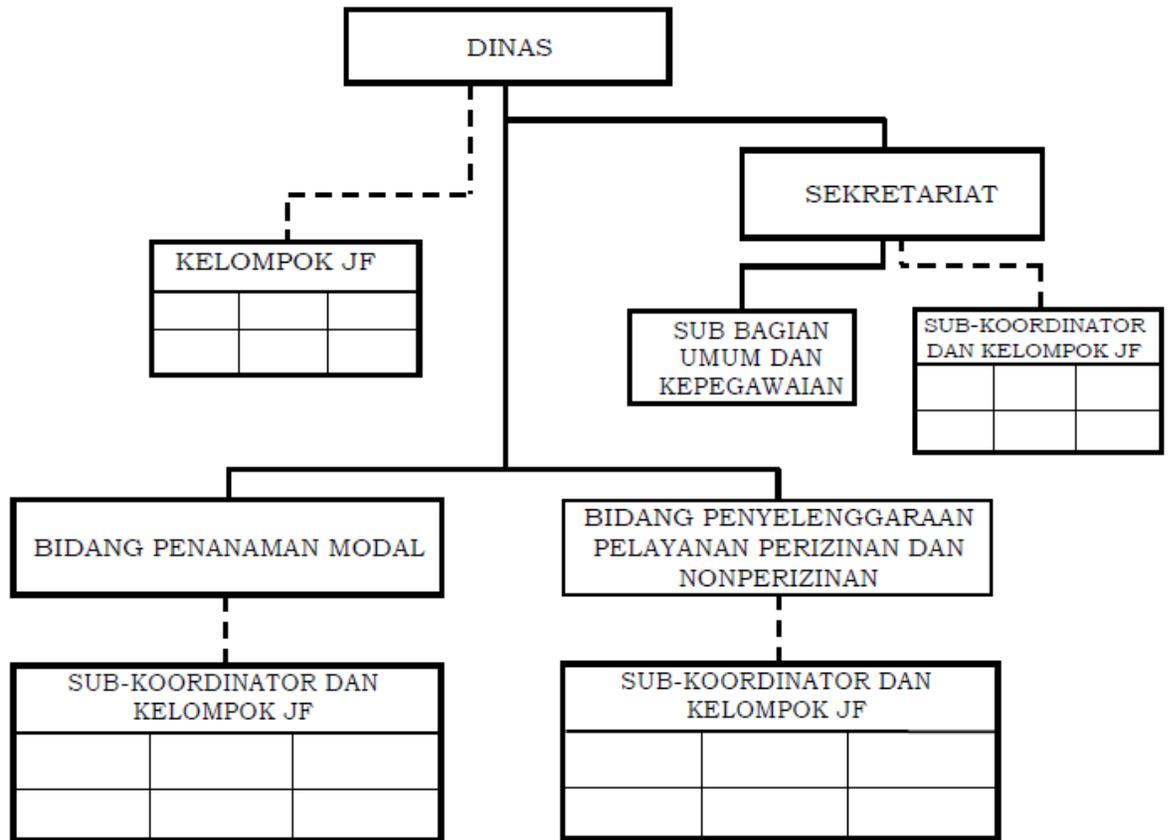
Sedangkan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah :

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



D. Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Permasalahan pokok pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang pada RPJMD 2018-2023 adalah Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Aparatur Daerah. Dari permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Masalah Pokok DPMPTSP

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Masih rendahnya nilai investasi di daerah	<p>Masih rendahnya iklim investasi dan penanaman modal</p> <p>Masih kurangnya upaya promosi penanaman modal</p>

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2021, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 - 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2022 telah dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis dengan menyusun Perubahan Renstra 2018-2023. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang selama kurun waktu 2018-2023 adalah **“Meningkat nya Nilai Investasi PMA, PMDN dan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal”**. Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan potensi dan peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1. Visi Kabupaten Lumajang

Visi Kabupaten Lumajang adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”**.

2. Misi Kabupaten Lumajang

Adapun Misi yang mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang tersebut adalah :

Misi Ke 1 yaitu : Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata. Maksudnya meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan

berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, dan jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Misi ke 2 yaitu : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Lebih Sejahtera dan Mandiri.

Maksudnya meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.

Misi Ke 3 yaitu : Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Benar, Dan Bersih (good and clear governance) Yang Berbasis Teknologi Informasi.

Maksudnya mewujudkan pemerintah yang baik, benar, dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan, daerah tersebut.

Berdasarkan ketiga misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lumajang, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”** serta berperan secara aktif dalam misi pertama yaitu **” Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata ”**.

1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah

ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018-2023 menetapkan tujuan yaitu:

Tabel 2.1 Tujuan DPMPTSP

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN	192.149,1 Juta

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam rentang waktu Renstra 2018-2023 adalah :

Tabel 2.2 Sasaran DPMPTSP Tahun 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	Nilai IKM SMT I + Nilai IKM SMT II 2	87

c. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi perangkat daerah. Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang ialah :

- 1). kemudahan akses informasi terkait potensi dan peluang investasi di daerah;
- 2). melakukan upaya promosi dan publikasi tentang perubahan layanan penanaman modal dan perizinan secara elektronik;
- 3). kemudahan akses layanan perizinan yang berbasis elektronik; dan
- 4). Kemudahan akses layanan perizinan dengan membangun suatu tempat pelayanan terpadu yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP).

d. Program

Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari kegiatan :
 - a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 2) Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Selain program dan kegiatan utama diatas, terdapat juga program dan kegiatan penunjang yang mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Rencana Kerja Tahunanan

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten lumajang kemudian diturunkan dalam target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka

pendek (tahunan), Target Capaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Rencana Kerja Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS	TARGET CAPAIAN
Meningkatnya nilai Investasi		Nilai Investasi	Nilai Investasi PMA dan PMDN	192.149,1 Juta
	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta
	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87

Pada Tahun Anggaran 2022 Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel 2.4 Rencana Kerja Tahun 2022

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
	PROGRAM			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	5 %	39.067.000
	KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.02.201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	50 %	31.750.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.201.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.150.000
2.18.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	21.600.000
	KEGIATAN			
2.18.02.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Peta Potensi yang disusun	60 %	7.317.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.202.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.317.000
	PROGRAM			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Penanaman Modal	192.149,15 Juta	62.068.000
	KEGIATAN			
2.18.03.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	50 Orang	62.068.000
	SUB KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.03.201.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.068.000
2.18.03.201.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000
	PROGRAM			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	50 %	405.525.010
	KEGIATAN			
2.18.05.201.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM	60 Pelaku Usaha	405.525.010
	SUB KEGIATAN			
2.18.05.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	180 Pelaku Usaha	271.830.010
2.18.05.201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	75 Kegiatan Usaha	133.695.000
	PROGRAM			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	90 %	262.307.000
	KEGIATAN			
2.18.04.201	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	51 Pelayanan	262.307.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.04.201.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	81.332.000
2.18.04.201.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	55 Kegiatan Usaha	176.175.000

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.04.201.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu dan Perizinan Nonperizinan	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	90 Orang	4.800.000
	PROGRAM			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	70 %	308.120.200
	KEGIATAN			
2.18.06.201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan	51 jenis data layanan perizinan dan nonperizinan	308.120.200
	SUB KEGIATAN			
2.18.06.201.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	308.120.200
	PROGRAM			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	4.466.253.312
	KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	4.450.500
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	627.500
2.18.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.091.750
2.18.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.098.750
2.18.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	627.500
2.18.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	1.005.000
	KEGIATAN			
2.18.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.075.071.188
	SUB KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/1 2 bulan	2.028.484.938
2.18.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44.331.000
2.18.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.500.250
2.18.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	755.000
	KEGIATAN			
2.18.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	367.140.230
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.575.920
2.18.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	213.921.390
2.18.01.206.05	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.834.120

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.000.000
2.18.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12.207.800
2.18.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.601.000
	KEGIATAN			
2.18.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	665.601.719
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	130 Unit	665.601.719
	KEGIATAN			
2.18.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	499.156.000
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.100.000
2.18.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	208.056.000
	KEGIATAN			
2.18.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	854.833.675
	SUB KEGIATAN			

NO	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
2.18.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	115.099.600
2.18.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	27.150.000
2.18.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	681.674.120
2.18.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.909.955

C. Perjanjian Kinerja

Tujuan perjanjian kinerja antara lain ialah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah dibuat untuk melaksanakan program, sasaran dan kegiatan pada Tahun 2022 menjadi tumpuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Perjanjian Kinerja ini merupakan janji kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Target
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai IKM SMT I} + \text{Nilai IKM SMT II}}{2}$	87
No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Rumus	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	$\frac{(\text{Jumlah capaian seluruh kegiatan}) / (\text{Jumlah kegiatan penunjang}) \times 100}{100}$	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	$\frac{(\text{Realisasi tahun } n - \text{Target Realisasi tahun } n) / \text{Target Realisasi tahun } n \times 100}{100}$	5 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	192.149,15 Juta
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/ atau Pertimbangan Teknis	$\frac{\text{Jumlah permohonan terlayani}}{\text{Jumlah permohonan yang masuk}} \times 100$	90 %

No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Rumus	Target
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	Jumlah pelaku usaha tertib LKPM / Jumlah pelaku usaha wajib lapor LKPM x 100	50 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah layanan yang terintegrasi di sistem e-Simpadu/ Jumlah jenis layanan sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 x 100	70 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya, strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran serta rencana solusinya, adapun capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya nilai Investasi		Nilai Investasi	192.149,1 Juta	916.203,1 6 Juta	477%
	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta	31.610,16 Juta	1440%
	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta	884.593 Juta	466%
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87	87,6	100,69%

Sumber data : Release data NSWI BKPM, SKM Smt I & II 2022

Pada Tabel 3.1 disajikan capaian realisasi target sasaran strategis DPMPTSP. Pada tabel tersebut seluruh sasaran strategis yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah ditentukan, yaitu dengan rata-rata capaian pada 3 sasaran diatas adalah 668,90% (**predikat sangat baik**). Dari 3 sasaran yang telah diukur kinerjanya capaian tertinggi pada sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang, dimana dari target yang

ditentukan sebesar 2.195,65 Juta tercapai 31.610,16 Juta dengan presentase capaian sebesar 1440 %. Penyebab keberhasilan atas capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
2. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN).
3. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus.
4. Penguataan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi.
5. Harmonisasi perangkat daerah terhadap peningkatan investasi daerah.

Pada Tabel 3.2 disajikan capaian realisasi target Program dan Kegiatan DPMPTSP. Pada tabel tersebut seluruh Program telah tercapai target kinerja yang telah ditentukan dengan rata-rata capaian diatas 100%. Namun pada target kegiatan terdapat 2 kegiatan yang belum mencapai target, yaitu Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Dimana faktor penghambatnya adalah :

1. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perda No 10 Tahun 2021 masih dalam proses Harmonisasi di Biro Hukum Surabaya yang salah satunya tentang pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.
2. Belum adanya Peta Potensi Investasi Digital pada perencanaan tahun 2022.

Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut :

1. Secara aktif berkolaborasi dengan Bagian Hukum dalam proses harmonisasi rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Perda No 10 Tahun 2021.
2. Melakukan penyusunan aplikasi Peta Potensi Investasi berbasis *Web Geografic Information System* (GIS) pada dokumen perencanaan tahun 2023.

Tabel 3.2 Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	PROGRAM							
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	5 %	39.067.000	377%	38.385.150	7536%	98,25 %
	KEGIATAN							
2.18.02.20	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	50 %	31.750.000	0 %	31.478.000	0%	99,14%
	SUB KEGIATAN							
2.18.02.201.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10.150.000	0 Dokumen	9.878.000	0%	97,32%
2.18.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	21.600.000	0 Kegiatan Usaha	21.600.000	0%	100,00 %
	KEGIATAN							
2.18.02.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Peta Potensi yang disusun	60 %	7.317.000	0 %	6.907.150	0%	94,40%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	SUB KEGIATAN							
2.18.02.202.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.317.000	0 Dokumen	6.907.150	0%	94,40%
	PROGRAM							
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Penanaman Modal	192.149,15 Juta	62.068.000	916.203,16 Juta	61.058.500	477%	98,37 %
	KEGIATAN							
2.18.03.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi	50 Orang	62.068.000	50 Orang	61.058.500	100%	98,37%
	SUB KEGIATAN							
2.18.03.201.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.068.000	1 Dokumen	21.879.000	100%	99,14%
2.18.03.201.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	39.179.500	100%	97,95%
	PROGRAM							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	50 %	405.525.010	69 %	353.924.720	138%	87,28 %
	KEGIATAN							
2.18.05.2 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM	60 Pelaku Usaha	405.525.010	124 Pelaku Usaha	353.924.720	207%	87,28%
	SUB KEGIATAN							
2.18.05.20 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	180 Pelaku Usaha	271.830.010	245 Pelaku Usaha	225.592.600	136%	82,99%
2.18.05.201.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	75 Kegiatan Usaha	133.695.000	11 Kegiatan Usaha	128.332.120	15%	95,99%
	PROGRAM							
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	90 %	262.307.000	100 %	251.917.220	111%	96,04 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	KEGIATAN							
2.18.04.201	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota	51 Pelayanan	262.307.000	51 Pelayanan	251.917.220	100%	96,04%
	SUB KEGIATAN							
2.18.04.201.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	81.332.000	3349 Pelaku Usaha	76.903.000	134%	94,55%
2.18.04.201.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	55 Kegiatan Usaha	176.175.000	124 Kegiatan Usaha	172.575.000	225%	97,96%
2.18.04.201.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat	90 Orang	4.800.000	163 Orang	2.439.220	181%	50,82%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
		Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						
	PROGRAM							
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	70 %	308.120.200	88,24 %	305.525.505	126%	99,16 %
	KEGIATAN							
2.18.06.201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan	51 jenis data layanan perizinan dan nonperizinan	308.120.200	51 jenis data layanan perizinan dan nonperizinan	305.525.505	100%	99,16%
	SUB KEGIATAN							
2.18.06.201.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	308.120.200	4 Dokumen	305.525.505	100%	99,16%
	PROGRAM							
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan	100%	4.466.253.312	100 %	4.079.692.398	100%	91,34 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran						
	KEGIATAN							
2.18.01.2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	4.450.500	100 %	3.920.800	100%	88,10%
	SUB KEGIATAN							
2.18.01. 201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	627.500	2 Dokumen	528.000	100%	84,14%
2.18.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.091.750	1 Dokumen	910.000	100%	83,35%
2.18.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.098.750	2 Dokumen	1.058.750	100%	96,36%
2.18.01.2 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	5 Laporan	627.500	5 Laporan	487.200	100%	77,64%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
2.18.01.201.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	1.005.000	16 Laporan	936.850	100%	93,22%
	KEGIATAN							
2.18.01.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.075.071.188	100 %	1.977.472.760	100%	95,30%
	SUB KEGIATAN							
2.18.01.202.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/12 bulan	2.028.484.938	17 Orang/12 bulan	1.931.032.870	100%	95,20%
2.18.01.202.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44.331.000	12 Dokumen	44.331.000	100%	100,00 %
2.18.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.500.250	6 Laporan	1.485.640	100%	99,03%
2.18.01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	18 Laporan	755.000	18 Laporan	623.250	100%	82,55%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
	KEGIATAN							
2.18.01.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	367.140.230	100 %	343.255.315	100%	93,49%
	SUB KEGIATAN							
2.18.01.20 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.575.920	1 Paket	7.419.500	100%	97,94%
2.18.01.20 1.206.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	213.921.390	1 Paket	198.335.534	100%	92,71%
2.18.01.20 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.834.120	1 Paket	14.103.600	100%	95,08%
2.18.01.20 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	6.000.000	48 Dokumen	3.970.000	100%	66,17%
2.18.01.20 1.206.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12.207.800	12 Paket	11.397.000	100%	93,36%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
2.18.01.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.601.000	12 Laporan	108.029.681	100%	95,94%
	KEGIATAN							
2.18.0 1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	665.601.719	100 %	603.456.943	100%	90,66%
	SUB KEGIATAN							
2.18.0 1.207.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	130 Unit	665.601.719	130 Unit	603.456.943	100%	90,66%
	KEGIATAN							
2.18.01.2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	499.156.000	100 %	443.327.884	100%	88,82%
	SUB KEGIATAN							
2.18.01.20 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	291.100.000	12 Laporan	238.358.654	100%	81,88%
2.18.01.20 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	208.056.000	84 Laporan	204.969.230	100%	98,52%
	KEGIATAN							
2.18 .01.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	854.833.675	100 %	708.258.696	100%	82,85%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
	Pemerintahan Daerah							
	SUB KEGIATAN							
2.18.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	115.099.600	11 Unit	113.952.154	100%	99,00%
2.18.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	27.150.000	39 Unit	27.085.000	100%	99,76%
2.18.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	681.674.120	5 Unit	539.426.745	100%	79,13%
2.18.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.909.955	1 Unit	27.794.797	100%	89,92%

Sumber data : Release data NSWI BKPM, DPMPTSP tahun 2022 (data diolah)

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
 Capaian kinerja DPMPSTP tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022

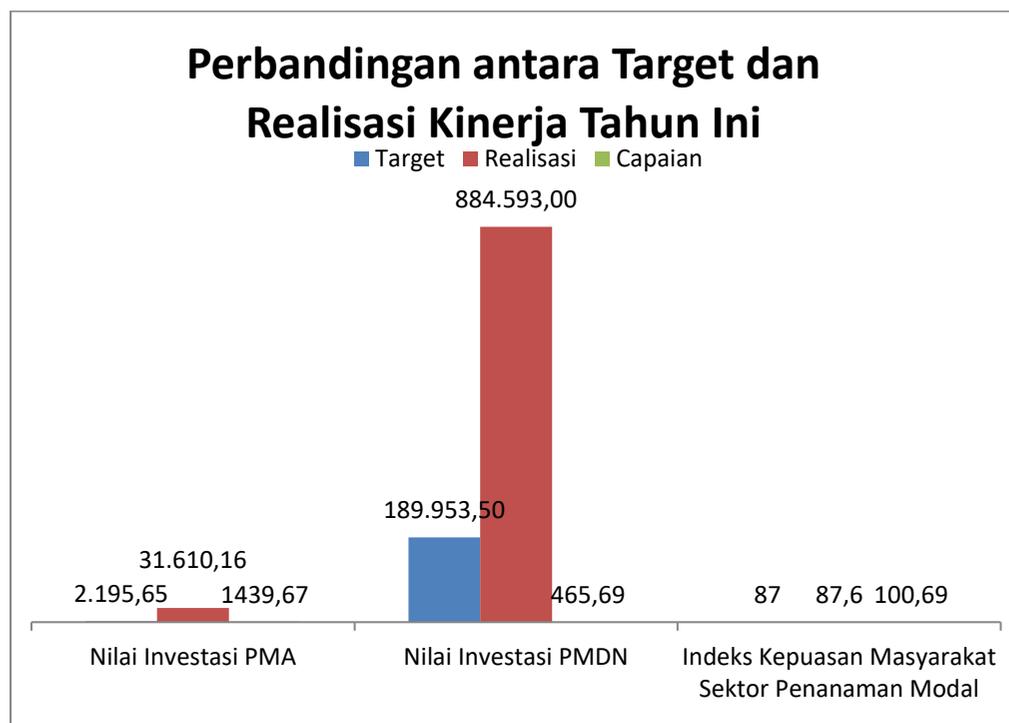
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta	31.610,16 Juta	1440 %
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta	884.593 Juta	466 %
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87	87,6	100,69%

Sumber data : Release data NSWI BKPM, DPMPSTP tahun 2022 (data diolah)

Pada tabel 3.3 disajikan data perbandingan target capaian kinerja dan realisasi kinerja tahun 2022. Dimana capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu mencapai 87,6 dengan capaian 100,69% dari target yang ditentukan. Pada Sasaran Meningkatkan Nilai Investasi PMA dan PMDN capaian target melebihi yang telah ditetapkan dengan capaian lebih dari 100% dengan capaian nilai investasi PMA naik sebesar 1440% dan nilai investasi PMDN naik sebesar 466%. Tingkat capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya kepatuhan penyampaian LKPM dengan inovasi Layanan Investasi Keliling (LILIN) dan penerapan sistem OSS-RBA yang sudah berjalan dengan baik dengan beberapa pengembangan yang mempermudah dalam penyampaian LKPM, serta peningkatan sarana prasarana dan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lumajang dengan terbangunnya Mal pelayanan Publik (MPP).

Gambaran perbandingan antara target, realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP tahun 2020-2022 yang ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	1.991,5 Juta	1.384 Juta	31.610,16 Juta	100%	66,19 %	1440 %
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	172.293,4 Juta	59.891 Juta	884.593 Juta	100%	33,11 %	466%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	86,33	86,57	87,6	100,3 8%	100,0 8%	100,6 9%

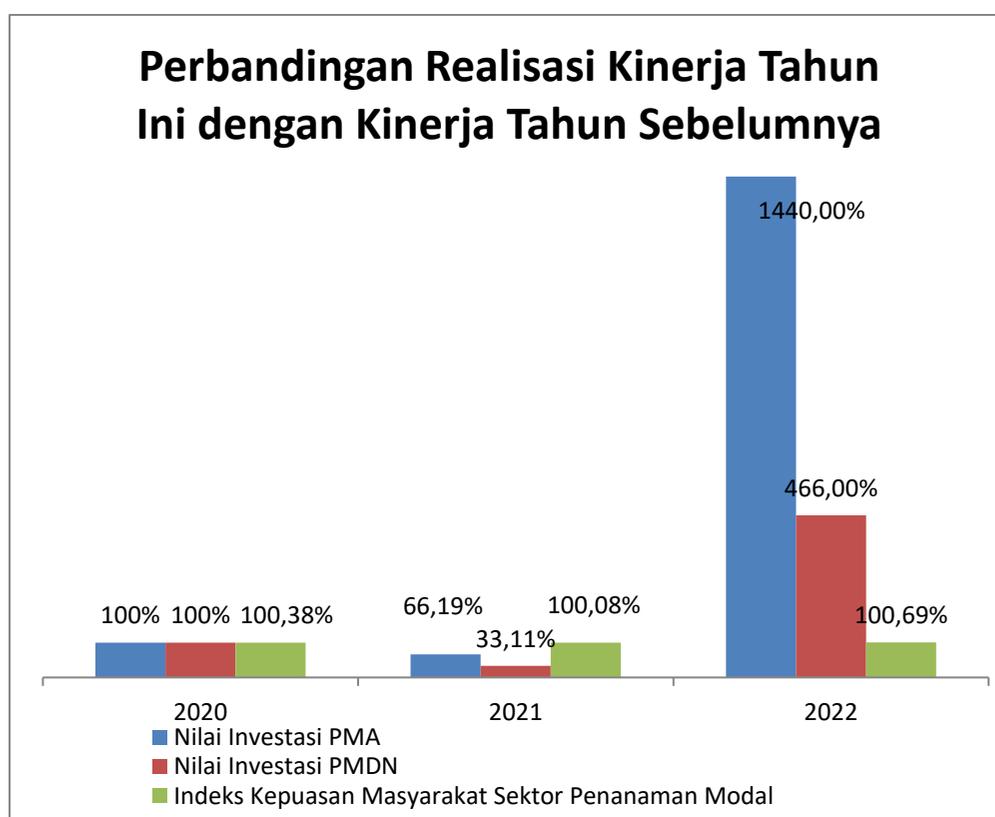
Sumber data : Release data NSWI BKPM, DPMPTSP tahun 2022 (data diolah)

Pada tabel 3.4 menunjukkan adanya kenaikan realiasi kinerja dari tahun sebelumnya, yaitu terdapat kenaikan

1,19% pada sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal dari tahun 2021. Meskipun pada perbandingan tahun 2021 dan 2020 sasaran Nilai Investasi PMA dan PMDN terdapat penurunan, pada tahun 2022 telah mengalami kenaikan yaitu 2.183,97% pada sasaran Nilai Investasi PMA dari tahun 2021 dan 1.377% pada sasaran Nilai Investasi PMDN dari tahun 2021.

Gambaran Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023

Rencana kerja tahun 2022 merupakan gradasi dari Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) 2018-2023. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target pada P-Renstra 2018-2023.

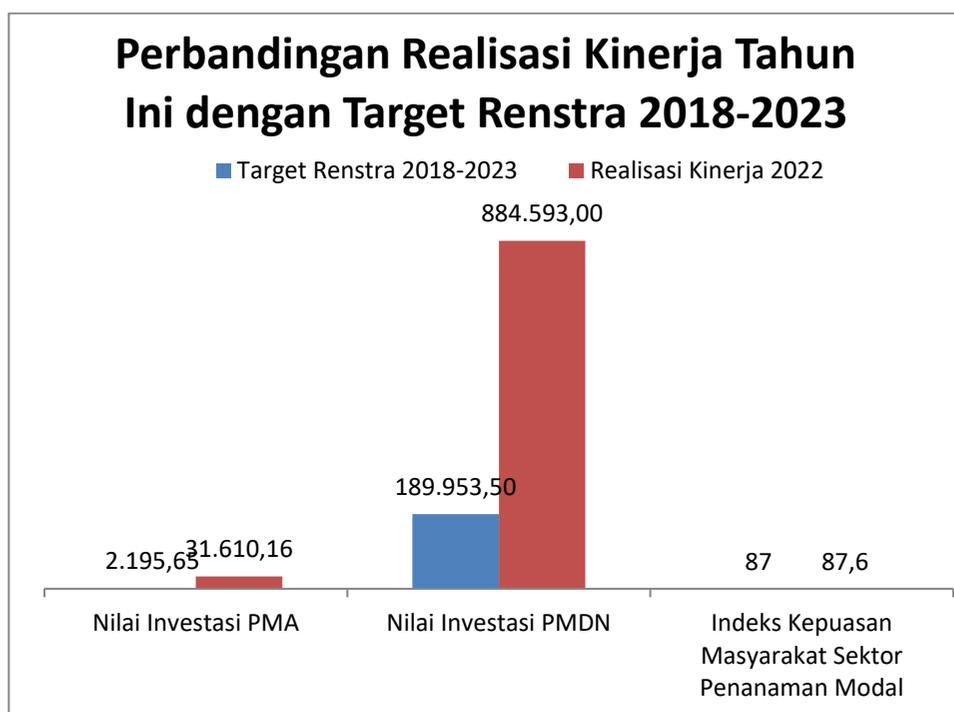
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Renstra 2018-2023
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	31.610,16 Juta	2.195,65 Juta
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN	884.593 Juta	189.953,5 Juta
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,6	87

Sumber data : Release data NSWI BKPM, DPMPSTP tahun 2022 (data diolah)

Pada tahun 2022 realisasi kinerja DPMPSTP dibandingkan dengan target capaian kinerja pada Renstra 2018-2023 secara keseluruhan telah tercapai dengan rata-rata capaian diatas 100% seperti disajikan pada tabel 3.5 dan gambar 3.3.

Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Provinsi Tahun 2022	Capaian
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	31.610,16 Juta	44.973.520 Juta	0,07%
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	884.593 Juta	65.355.949,20 Juta	1,35%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87,6	88,47	99,02%

Sumber data : Release data NSWI BKPM, DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan DPMPTSP Kabupaten Lumajang tahun 2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa indikator kinerja sasaran DPMPTSP tahun 2022 berkontribusi 0,83% atas capaian nilai realisasi investasi Provinsi Jawa Timur dan tingkat Kepuasan Masyarakat mendapatkan predikat **Baik** terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Lumajang dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022 seluruh target Sasaran Kinerja DPMPTSP telah terealisasi melebihi target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan Renstra 2018-2023 dengan capaian kinerja berada diatas 100%. Kenaikan ini merupakan bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi yang dibuat pada DPMPTSP telah mampu dalam menunjang tercapainya target serta dapat dirasakan oleh masyarakat yang memohonkan izin usahanya maupun layanan lain yang diterima dari DPMPTSP.

Adapun pada sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMDN pada tahun

2022 terdapat kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan capaian pada tahun 2020 dan 2021 yaitu mencapai lebih dari 120%. Pada sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal terjadi kenaikan pula dari tahun 2020 dan 2021 yaitu mencapai 101%. Disamping meningkatnya capaian seluruh sasaran kinerja, Kabupaten Lumajang juga telah berhasil membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di Jalan Veteran No. 72 Lumajang dan telah diujicoba pada 24 September 2022 serta diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada 5 Desember 2022. Dengan adanya MPP tersebut mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui 18 gerai pelayanan yang terdiri dari 7 Perangkat Daerah dan 11 Kementerian/Lembaga dengan 127 jenis layanan.

Dalam usaha mewujudkan capaian kinerja tersebut terdapat faktor-faktor penunjang keberhasilan yang mempengaruhi, antara lain :

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. Inovasi yang dibuat mampu mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan (inovasi LILIN);
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dilakukan secara terus-menerus;
- d. Penguatan jejaring antar daerah dalam mendukung peningkatan nilai investasi;
- e. Harmonisasi perangkat daerah terhadap peningkatan investasi daerah;
- f. Adanya sistem pelayanan berbasis elektronik yang mudah diakses; dan
- g. Performa petugas pelayanan yang baik.

Disamping faktor penunjang keberhasilan terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi disemua sektor unggulan daerah

- b. Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer (IPRO) / Feasibility Study (FS) yang menunjang kegiatan promosi pada seluruh potensi investasi
- c. Belum tersusunnya peta potensi investasi yang dapat diakses secara langsung oleh investor
- d. Kurang optimalnya peranan Tim Koordinasi Percepatan Investasi dalam melaksanakan Program Kerja yang sudah di susun
- e. Kurangnya informasi masyarakat tentang layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU dan DAK Non-Fisik. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.7 :

Tabel 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	5.543.340.522	5.090.503.492,72	91,83%
Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal			

Dari tabel 3.7 terlihat bahwa anggaran yang tersedia untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dipergunakan dengan efisien dan efektif untuk mencapai target sasaran tahun 2022 sesuai *time schedule*/Rencana Anggaran Kas yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektifitas anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditunjang dengan keberadaan inovasi Layanan Investasi Keliling (LILIN) yang mampu meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Lumajang dan terbangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menunjang efisiensi dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat yang mencakup 18 gerai pelayanan (instansi yang tergabung terdiri dari 7 OPD dan 11 Kementerian/Lembaga dengan 127 jenis layanan).

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2022 seluruh Program yang diampu oleh DPMPTSP telah mencapai target yang ditentukan, dengan capaian rata-rata diatas 100%. Program-program tersebut turut berkontribusi terhadap capaian Sasaran Strategis dan Tujuan DPMPTSP, dengan capaian Tujuan DPMPTSP sebesar 916 Miliar dan meningkat sebesar 855 Miliar dari realisasi tahun 2021 dan sebesar 724 Miliar dari target 192 Miliar pada tahun 2022. Capaian tersebut ditunjang langsung oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang menyediakan regulasi dan peta potensi investasi, Program Promosi Penanaman Modal dengan penyelenggaraan kegiatan forum bisnis dan pameran investasi dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha secara berkelanjutan guna menjamin kegiatan usaha telah dilakukan sesuai standar dan terselesaikannya hambatan-hambatan yang dialami.

Disamping itu ditunjang pula dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal yang menyediakan pelayanan penerbitan izin dan non izin, Konsultasi dan Pengaduan. Dimana tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanaman modal yang diterima turut mempengaruhi tingkat kepercayaan penanaman modal untuk berinvestasi di Kabupaten Lumajang. serta didukung dengan sarana dan prasarana penunjang lain yang disediakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari uraian tersebut dapat diambil beberapa faktor penyebab keberhasilan program tersebut adalah :

- a. Adanya komitmen dari Kepala Dinas serta kesigapan petugas pelayanan dalam melayani pemohon dan ketersediaan SP dan SOP yang telah diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang teknis.
- b. Adanya Inovasi Layanan Investasi Keliling (LILIN) dengan sasaran meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketertiban pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usahanya melalui penyampaian LKPM secara online.
- c. Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mengintegrasikan instansi perangkat daerah dan kementerian/lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi serta bertanda tangan elektronik yang mampu memberikan percepatan penerbitan izin dan non izin.

Namun terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perda No 10 Tahun 2021 yaitu Pemberian Insentif/Fasilitas Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha masih dalam proses Harmonisasi di Biro Hukum Surabaya.
- b. Belum adanya Peta Potensi Investasi yang mampu menggambarkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Lumajang berbasis GIS.

- c. Mindset pelaku usaha tentang penyampaian LKPM yang memiliki konsekuensi terhadap penagihan pajak sehingga berdampak belum tertibnya penyampaian LKPM.
- d. Belum sinerginya SOP layanan perizinan antar perangkat daerah, sehingga proses rekomendasi teknis membutuhkan waktu yang relatif lama.

8. Permasalahan dan Inovasi DPMPTSP Kabupaten Lumajang pada Tahun 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang menganalisa beberapa permasalahan yang kemudian memunculkan inovasi yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang ada diantaranya adalah:

- a. Belum tertibnya pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usaha pada aplikasi LKPM online.
- b. Belum adanya peta potensi investasi dari data potensi investasi masing - masing sektor.
- c. Belum tersusunnya I-PRO (Feasibility study) pada potensi investasi yang ada.
- d. Belum optimalnya penyampaian informasi persyaratan dan prosedur layanan yang diberikan
- e. Kurang cepatnya pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang berinovasi dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.
- b. Pelayanan Cepat Tanggap (Fast Response) untuk pelayanan jemput bola terjadwal.
- c. Pengembangan fitur peta potensi investasi digital yang terintegrasi dengan website resmi DPMPTSP.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang untuk mengelolanya secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ialah :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
	PROGRAM			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	39.067.000	38.385.150	98,25 %
	KEGIATAN			
2.18.02.201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.750.000	31.478.000	99,14%
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.201.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.150.000	9.878.000	97,32%
2.18.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	21.600.000	21.600.000	100,00 %
	KEGIATAN			
2.18.02.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	7.317.000	6.907.150	94,40%
	SUB KEGIATAN			
2.18.02.202.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7.317.000	6.907.150	94,40%
	PROGRAM			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	62.068.000	61.058.500	98,37 %

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
	KEGIATAN			
2.18.03.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	62.068.000	61.058.500	98,37%
	SUB KEGIATAN			
2.18.03.201.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.068.000	21.879.000	99,14%
2.18.03.201.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	39.179.500	97,95%
	PROGRAM			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	405.525.010	353.924.720	87,28 %
	KEGIATAN			
2.18.05.201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	405.525.010	353.924.720	87,28%
	SUB KEGIATAN			
2.18.05.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	271.830.010	225.592.600	82,99%
2.18.05.201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	133.695.000	128.332.120	95,99%
	PROGRAM			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	262.307.000	251.917.220	96,04 %
	KEGIATAN			
2.18.04.201	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	262.307.000	251.917.220	96,04%
	SUB KEGIATAN			
2.18.04.201.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	81.332.000	76.903.000	94,55%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.04. 201.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	176.175.000	172.575.000	97,96%
2.18.04. 201.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	4.800.000	2.439.220	50,82%
	PROGRAM			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	308.120.200	305.525.505	99,16 %
	KEGIATAN			
2.18.06. 201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	308.120.200	305.525.505	99,16%
	SUB KEGIATAN			
2.18.06. 201.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	308.120.200	305.525.505	99,16%
	PROGRAM			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.466.253.312	4.079.692.398	91,34 %
	KEGIATAN			
2.18.01. 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.450.500	3.920.800	88,10%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01. 201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	627.500	528.000	84,14%
2.18.01. 201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.091.750	910.000	83,35%
2.18.01. 201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.098.750	1.058.750	96,36%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	627.500	487.200	77,64%
2.18.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.005.000	936.850	93,22%
	KEGIATAN			
2.18.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.075.071.188	1.977.472.760	95,30%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.028.484.938	1.931.032.870	95,20%
2.18.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.331.000	44.331.000	100,00%
2.18.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.250	1.485.640	99,03%
2.18.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	755.000	623.250	82,55%
	KEGIATAN			
2.18.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.140.230	343.255.315	93,49%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.575.920	7.419.500	97,94%
2.18.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.921.390	198.335.534	92,71%
2.18.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.834.120	14.103.600	95,08%
2.18.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	3.970.000	66,17%
2.18.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	12.207.800	11.397.000	93,36%
2.18.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.601.000	108.029.681	95,94%
	KEGIATAN			
2.18.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	665.601.719	603.456.943	90,66%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	665.601.719	603.456.943	90,66%
	KEGIATAN			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2.18.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.156.000	443.327.884	88,82%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.100.000	238.358.654	81,88%
2.18.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.056.000	204.969.230	98,52%
	KEGIATAN			
2.18.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854.833.675	708.258.696	82,85%
	SUB KEGIATAN			
2.18.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.099.600	113.952.154	99,00%
2.18.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.150.000	27.085.000	99,76%
2.18.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	681.674.120	539.426.745	79,13%
2.18.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.909.955	27.794.797	89,92%

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran yang disediakan untuk mewujudkan Target Kinerja			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMA	2.195,65 Juta	31.610,16 Juta	965%	5.543.340.522	5.090.503.492,72	91,83%	577%
2	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kab. Lumajang	Nilai Investasi PMDN	189.953,5 Juta	884.593 Juta	283%				
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87	87,6	100,69%				

Jika dibandingkan sasaran dan indikator kinerja utama tersebut di tahun 2022 rata-rata tercapai 668,68% (sangat baik) dari targetnya sedangkan realisasi anggaran TA. 2022 terealisasi 91,83% atau dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 577%.

Besarnya efisiensi tersebut disebabkan oleh capaian kinerja Indikator Kinerja Utama melebihi ekspektasi yang telah ditargetkan dengan beberapa faktor penunjang diantaranya adalah komitmen dari Kepala Dinas; meningkatnya kepatuhan penyampaian LKPM oleh pelaku usaha yang ditunjang dengan inovasi LILIN; terbangunnya MPP sebagai tempat pelayanan terintegrasi dengan instansi perangkat daerah dan kementerian/lembaga; dan tersedianya sistem pelayanan berbasis elektronik yang memudahkan dalam pelayanan.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator kinerja DPMPTSP memiliki tingkat efisiensi positif. Hal ini menjadi bahan motivasi kami dalam percepatan pencapaian target indikator sasaran DPMPTSP dengan menekankan aspek efektifitas disamping efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban manajerial, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti yang telah diamanatkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Kinerja ini memuat hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang berisi keberhasilan dan kegagalan, masalah, usulan pemecahan dan saran. Capaian kinerja pada tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan dengan tercapainya target kinerja pada Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Meskipun dalam perjalanannya terdapat pula permasalahan dan hambatan yang harus ditanggulangi dan ditingkatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hambatan yang dihadapi dan upaya dalam perbaikannya ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

NO	HAMBATAN	UPAYA
1	Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi disemua sektor unggulan daerah	Optimalisasi promosi peluang investasi dengan fokus pada sektor unggulan di Kabupaten Lumajang
2	Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer (IPRO) / Feasibility Study (FS) yang menunjang kegiatan promosi pada seluruh potensi investasi	Merencanakan dan melakukan penyusunan IPRO/FS pada tahun anggaran berikutnya
3	Belum tersusunnya peta	Melakukan penyusunan peta

NO	HAMBATAN	UPAYA
	potensi investasi yang dapat diakses secara langsung oleh investor	potensi investasi yang dapat diakses secara langsung oleh calon investor
4	Kurang optimalnya peranan Tim Koordinasi Percepatan Investasi dalam melaksanakan Program Kerja yang sudah di susun	Optimalisasi Tim Percepatan Berusaha dengan melakukan evaluasi capaian Program Kerja yang telah disusun
5	Kurangnya informasi masyarakat tentang layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana publikasi informasi layanan Perizinan dan Non Perizinan, serta meningkatkan keandalan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi secara elektronik

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan, saran dan kiritik yang membangun akan kami jadikan pertimbangan dalam penyusunan laporan kinerja selanjutnya. Semoga dengan disusunnya laporan kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan ke depan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 17 FEB 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURCONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001

LAMPIRAN





PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARI MURCONO, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, Oktober 2022

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.


ARI MURCONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Investasi PMA Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMA	Rp. 2.195.650.914
2.	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN Kabupaten Lumajang	Nilai Investasi PMDN	Rp. 189.953.495.601
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Sektor Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal	87
No.	Sasaran Pogram	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	5 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Penanaman Modal	192.149,15 Juta
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/ atau Pertimbangan Teknis	90 %
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	50 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	70 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA;	Rp. 4.466.253.312	APBD
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL;	Rp. 39.067.000	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL;	Rp. 62.068.000	APBD
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL;	Rp. 405.525.010	APBD DAN DAK
5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL;	Rp. 262.307.000	APBD
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.	Rp. 308.120.200	APBD

Lumajang, Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. THORIQUL HAQ, M.ML.



ARIMURCONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran No. 72 Telepon. (0334) 889822 - Fax. 894444
Email : dpm.ptsp@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

**PENCAPAIAN NILAI REALISASI INVESTASI TRI BULAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHUN 2022**

NO	TRIWULAN	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI TRIWULANAN	TRIWULAN	NILAI KOMULATIF DARI TAHUN KE-N
1	TRIWULAN I	51	93	1.919.625.031	I	1.919.625.031
2	TRIWULAN II	79	1847	151.753.299.998	II	153.672.925.029
3	TRIWULAN III	168	6014	405.278.668.574	III	558.951.593.603
4	TRIWULAN IV	36	4588	357.251.565.139	IV	916.203.158.742

PARAF HIRARKI		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKRETARIS		17/2 23
KABID. PM		17/2-2023
KASI		17/2 2023

Lumajang, 17 Februari 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ARI MURONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001

**REKAPITULASI IKM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK PERIODE SURVEI JANUARI S/D JUNI 2022**

No	Unsur Pelayanan	Kuisisioner				
		Pertanyaan	Total Bobot	Jumlah RTMK	Nilai Unsur Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	
1	Persyaratan	1	Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	1233	7	3.48
		2	Kesesuaian syarat yang terpublikasi dengan syarat yang diminta petugas	1226	4	3.46
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3	Kemudahan prosedur/ tata cara pelayanan	1254	4	3.54
3	Waktu Penyelesaian	4	Ketepatan waktu selesainya pelayanan sesuai dengan janji yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami	1208	23	3.41
		5	Kecepatan selesainya pelayanan	1202	2	3.40
4	Biaya / Tarif	6	Kesesuaian biaya/ tarif dengan yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami	1210	2	3.42
		7	Mahal murahnya biaya/tarif pelayanan	1322	3	3.73
5	Produk Spesifikasi Jenis	8	Kesesuaian produk yang diterima dengan janji produk yang diberikan/ terpublikasi/ terpahami	1203	7	3.40
6	Kompetensi Pelaksana	9	Kemampuan petugas dalam melayani	1273	10	3.60
7	Perilaku Pelaksana	10	Sikap perilaku petugas	1267	8	3.58
8	Sarana & Prasarana	11	Kualitas sarpras (sarana dan prasarana).	1240	10	3.50
		12	Kuantitas sarpras (sarana dan prasarana)	1285	10	3.63
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	13	Kecepatan respon terhadap keluhan/ pengaduan	1214	2	3.43
		14	Ketepatan penanganan pengaduan	1220	12	3.45
Nilai Hasil Survei			87.56	B	Baik	

Ket :

Total bobot (kolom 4) =

Jumlah RTMK (kolom 5) = jumlah responden yang tidak menjawab/mengisi pertanyaan kuisisioner

Nilai unsur pelayanan (kolom 6) = total bobot dibagi dgn jumlah responden

REKAPITULASI LAIN -LAIN :

1. Perkiraan Jumlah Populasi : 4500
2. Jumlah Responden : 354
3. Usia Responden Terbanyak : 20 - 29 thn
4. Pendidikan Terakhir Responden Terban : S1/D4
5. Jenis Kelamin Responden Terbanyak : Perempuan
6. Pekerjaan Responden Terbanyak : Pegawai Swasta
7. Jenis / bentuk / ruang lingkup pelayanan dilaksanakan
 - a. Izin Usaha (OSS)
 - b. IPR
 - c. PKDR
 - d. PKDPU
 - e. IMP/PBG
 - f. SITR (Tata Ruang)
 - g. LP2B (Lahan Pertanian)
 - h. Izin Profesi
8. Dari jenis / bentuk / ruang lingkup pelayanan sebagaimana angka 7 , yang terbanyak menimbulkan ketidakpuasan pelayanan apa?
9. Dari 9 unsur pelayanan, yang paling banyak terdapat ketidakpuasan pada unsur mana?

Unsur kecepatan waktu selesai pelayanan dan kesesuaian produk yang diterima dengan yang terpublikasi



Lumajang, 15 Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang

ARI MURCONO, S.STP, M.Si
NIP. 19780216 199703 1 001

**REKAPITULASI IKM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK PERIODE SURVEI JULI S/D DESEMBER 2022**

No.	Unsur Pelayanan	Kuisisioner				
		Pertanyaan	Total Bobot	Jumlah RTMK	Nilai Unsur Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	
1	Persyaratan	1	Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	1238	0	3,50
		2	Kesesuaian syarat yang terpublikasi dengan syarat yang diminta petugas	1173	0	3,31
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3	Kemudahan prosedur/ tata cara pelayanan	1257	0	3,55
3	Waktu Penyelesaian	4	Ketepatan waktu selesainya pelayanan sesuai dengan janji yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami	1217	0	3,44
		5	Kecepatan selesainya pelayanan	1229	0	3,47
4	Biaya / Tarif	6	Kesesuaian biaya/ tarif dengan yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami	1217	0	3,44
		7	Mahal murahnya biaya/tarif pelayanan	1381	0	3,90
5	Produk Spesifikasi Jenis	8	Kesesuaian produk yang diterima dengan janji produk yang diberikan/ terpublikasi/ terpahami	1217	0	3,44
6	Kompetensi Pelaksana	9	Kemampuan petugas dalam melayani	1274	0	3,60
7	Perilaku Pelaksana	10	Sikap perilaku petugas	1268	0	3,58
8	Sarana & Prasarana	11	Kualitas sarpras (sarana dan prasarana).	1119	0	3,16
		12	Kuantitas sarpras (sarana dan prasarana)	1298	0	3,67
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	13	Kecepatan respon terhadap keluhan/ pengaduan	1209	0	3,42
		14	Kelepatan penanganan pengaduan	1224	0	3,46
Nilai Hasil Survei			87,64	B	Baik	

Ket :
 Total bobot (kolom 4) = 17.321
 Jumlah RTMK (kolom 5) = 0
 Nilai unsur pelayanan (kolom 6) = 3,50

REKAPITULASI LAIN -LAIN :

1. Perkiraan Jumlah Populasi : 4500
2. Jumlah Responden : 354
3. Usia Responden Terbanyak : 30 - 39 thn
4. Pendidikan Terakhir Responden Terbanyak : S1/D4
5. Jenis Kelamin Responden Terbanyak : Perempuan
6. Pekerjaan Responden Terbanyak : Wiraswasta/ Usahawan
7. Jenis / bentuk / ruang lingkup pelayanan dilaksanakan
 - a. Izin Usaha (OSS)
 - b. IPR
 - c. PKDR
 - d. PKDPU
 - e. IMB/PBG
 - f. SITR (Tata Ruang)
 - g. LP2B (Lahan Pertanian)
 - h. Izin Profesi
8. Dari jenis / bentuk / ruang lingkup pelayanan sebagaimana angka 7 , yang terbanyak menimbulkan ketidakpuasan pelayanan apa?
 Layanan Izin Usaha (OSS) dengan keluhan terbanyak mengenai lambatnnya proses dan permasalahan pada aplikasi OSS
9. Dari 9 unsur pelayanan, yang paling banyak terdapat ketidakpuasan pada unsur mana?
 Unsur Persyaratan, Sarana dan Prasarana

Lumajang, 05 Januari 2022
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang



ARI MURONO, S.STP, M.Si
 NIP. 19780216 199703 1 001